UNIVERSITAS GADJAH MADA
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN DISKRESI DALAM PENUNDAAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA INDONESIA KE LUAR NEGERI: ANALISIS MEKANISME HUKUM PASCA-PENUNDAAN UNTUK MEMINIMALISIR MALADMINISTRASI
Hanif Shofarudin, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

Anggara, Sahya. 2020. Hukum Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Kencana.

Asshiddiqie, Jimly. 2021. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Busroh, Firman Freaddy. 2021. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Prenadamedia Group.

HR, Ridwan. 2020. Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

HR, Ridwan. 2018. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L. 2025. Teori Negara Hukum Modern. Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik. Gorontalo: UNG Press.

Mertokusumo, Sudikno. 2002. Mengenal Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Mujiburohman, Dian Aries. 2022. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta : STPN PRESS..

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud. 2019. Pengantar t. Jakarta: Kencana.

Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. 2017. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods) (A. K. Muzakkir (ed.); I). Makassar : CV. Social Politic Genius.

Sinambela, Lijan Poltak. 2021. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN DISKRESI DALAM PENUNDAAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA INDONESIA KE LUAR NEGERI: ANALISIS MEKANISME HUKUM PASCA-PENUNDAAN UNTUK MEMINIMALISIR MALADMINISTRASI
Hanif Shofarudin, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2. Artikel Jurnal :

Afandi, F. (2022). Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitianeor Sosio-Legal. Undang: Jurnal Hukum, 5(1), hlm. 231-255.

Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. Collegium Studiosum Journal, 6(2), hlm. 555-561.

Alfarizi, M. A., Syahada, R. N., & Dewi, L. A. K. (2021). Tinjauan yuridis terhadap peran kerja sama imigrasi dalam perlindungan hukum pekerja migran Indonesia. Jurnal Syntax Transformation, 2(04), hlm. 508-523.

Al'anam, Muklis. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch : Hubungan Moral Dan Hukum Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch : Hubungan Moral." Jurnal Humaniora 9, no. 1 (2025): 119–33. https://doi.org/10.30601/humaniora.v.

Arifin, F., 2025. Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 4(01), pp. Hlm 25-37.http://jurnal.saburai.id/index.php/jaeap/article/view/3867

Arifin, Ridwan, and Intan Nurkumalawati. "Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik Dan Profesionalisme Petugas Imigrasi." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, no. 2 (2020): 243. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14. Hlm. 244.

Arwanto, Bambang. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah." Yuridika 31, no. 3 (2016): 358.

Bakker, F. F., & Mirwanto, T. (2021). Kontribusi peranan imigrasi Indonesia dalam mencegah dan memberikan perlindungan HAM terhadap adanya pekerja migran nonprosedural (PMI-NP) dari kejahatan transnasional. Journal of Law and Border Protection, 3(1), hlm, 51-63.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN DISKRESI DALAM PENUNDAAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA INDONESIA KE LUAR NEGERI: ANALISIS MEKANISME HUKUM PASCA-PENUNDAAN UNTUK MEMINIMALISIR MALADMINISTRASI
Hanif Shofarudin, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Carlo, Juan, Linus Abel Mahfud, and Syahwa Salsabila. "Evaluation of Discretionary Authority on Immigration Supervision." Legal Brief 11, no. 5 (2022): 3346–52. https://doi.org/10.35335/legal.xx.xx. Hlm. 3351.

Fatmah, S. A., Hustina, I. N., Mustofa, A., & Nu, T. (2025). Perlindungan Hukum Untuk Masyarakat Pada Pelaksanaan Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Dalam Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen, hlm. 7.

Firlana, H. and Tando, C.E., 2022. The Role Of Immigration In Supervision Of Indonesian Migrant Workers. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 5(1), hlm pp.69-77.https://www.academia.edu/94496376/The_Role_of_Immigration_in_Supervision_of_Indonesian_Migrant_Workers

Jatmiko, Sigit, and Hartanto. "Disparitas Penegakan Hukum Keimigrasian Indonesia (Prinsip Hukum Administrasi Negara)." Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia 2, no. 1 (2023): 47–64. https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i1.17.

Padmawati, Ni Komang Tari, and Pande Yogantara. "Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Pejabat Imigrasi Dalam Peraturan Turunan Undang-Undang Keimigrasian." Jurnal Kertha Wicara 11, no. 3 (2022): 488–500.

Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif" 5 (2019): 6.

Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). Journal Law and Government, 2(1), hlm. 46-58.

Saiful, W. M. L., Suryadi, M. A., & Hendra, M. (2024). Peran Keimigrasian Dalam Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Sebagai Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian: Peran Keimigrasian Dalam Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Sebagai Tenaga Kerja Asing

PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN DISKRESI DALAM PENUNDAAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA INDONESIA KE LUAR
NEGERI: ANALISIS MEKANISME HUKUM PASCA-PENUNDAAN UNTUK MEMINIMALISIR MALADMINISTRASI
Hanif Shofarudin, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama, 4(2), hlm. 8.

Shafina, L., & Sahlepi, M. A. (2024). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan Di Indonesia. UIR Law Review, 8(2), hlm. 27.

Sinulingga, Widha. "Tinjauan Yuridis Diskresi Pejabat Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 7, no. 1 (2018). https://doi.org/10.14421/sh.v7i1.2034.

Taufiqurrahman, M. (2024). Kebijakan Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik. Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi), 5(2), hlm. 15.

Yulianti, A.P. and Hamdi, M.A., 2025. KAJIAN YURIDIS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENOLAKAN PASPOR BERDASARKAN ASAS–ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB). Journal of Social and Economics Research, 7(1), pp.hlm 1024-1033.https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER/article/view/918

3. Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024 mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian .

4. Sumber Daring (Website):

Direktorat Jenderal Imigrasi. 2025. Imigrasi Tunda Keberangkatan 1.243 Jemaah Calon Haji Diduga Nonprosedural dari Sejumlah Bandara. https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/imigrasi-tunda-keberangkatan-

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN DISKRESI DALAM PENUNDAAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA INDONESIA KE LUAR NEGERI: ANALISIS MEKANISME HUKUM PASCA-PENUNDAAN UNTUK MEMINIMALISIR MALADMINISTRASI
Hanif Shofarudin, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

1243-jemaah-calon-haji-diduga-nonprosedural-dari-sejumlah-bandara. Diakses : tanggal 6 Juli 2025.

U.*S. Citizenship and Immigration Services. Immigration and Nationality Act. U.S. Department of Homeland Security. Retrieved June 17, 2025, from* https://www.uscis.gov/laws-and-policy/legislation/immigration-and-nationality-act, Diakses : tanggal 6 Juli 2025.

European Union. (2016). Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code). Official Journal of the European Union. Retrieved June 17, 2025, from https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj/eng, Diakses : tanggal 6 Juli 2025.